Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, H. Zainuddin. 2009, *Metodelogi Penelitian Hukum.* Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta.

Arief, Barda Nawawi. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Cornill, Paul. 1970, *"Criminality and Deviance in a Changing World",* Ceramah pada Kongres PBB IV mengenai *Prevention of Crime and treatment of Offender*.

Edy, Richad. 2010, *Aspek Legal Property: Teori, Contoh dan Aplikasi*, Andi Offsed, Yogyakarta.

Effendi, Rusli, dkk, 1986, "*Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional" dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta.

....., mengutip Antonie A.G. Peter, 1981, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gosita,Arief. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.

Hamzah, Andi. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

Harkrisnowo, Harkristuti. mengutip Jeremy Bentham dalam *"Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi di Indonesia",* Pidato Pengukuhan Guru Besar, UI, Jakarta.

Istanto, F. Sugeng. 2004, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hamdan, M. 1997, *Politik Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015, *Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum, Buku I Materi Hukum*, Komisi Yudisial, Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 1983, *Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Baru, Bandung.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

……, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Mansur, Didik M. Arief & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marzuki, Pater Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum,* Prenada Mulia, Jakarta.

MD, Mahfud, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

……., 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.

Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta.

……., 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

……, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung

Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

……., 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

……., 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana.* Alumni, Bandung.

Muliadi, Ahmad. 2014, *Politik Hukum, Cetakan Ke-2*, Akademia Permata, Padang.

Mulyadi, Lilik. 2007, *Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Cetakan ke- 2,* Djambatan, Jakarta.

Prasetyo, Teguh. 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke - 2, Nusamedia, Bandung.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sahetapy, J.E. 1996, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Urip Santoso, 2014, *Hukum Perumahan*, Kencana Premada Media Group, Jakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

……. 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

……..... 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

……. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

……. 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press. Jakarta.

……... 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

…….. 2014, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

……. dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW. 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogykarta.

Sunggono, Bambang. 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

……. 2011, *Metodologoi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Sutedi, Adrian. 2009, *Hukum Rumah Susun & Apartemen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suwondo, 1982, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi**
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dinyatakan berlaku dengan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883).

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2012).

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 2).

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

C. Jurnal, Karya Ilmiah dan Internet

Bambang Ali Kusumo, SH., M. Hum., 2008. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. *Artikel*. Vol. VII. No. 02. Wacana Hukum. Surakarta.

Bramantyo, 2012, *Efektivitas Regulasi Perumahan Di Indonesia Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).* Artikel, Widyariset, Vol. 15 No.1.

Cindy Sandra Lumingkewas, 2016, *Analisis Yuridis Pemaknaan Konsep dalam Pasal 16 Undang-Undang Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,* Artikel, Arena Hukum Volume 9, Nomor 3.

CNBC Indonesia "Sejuta Rumah Program Vital yang Dinomorduakan", *https://www.cnbcindonesia.com/market/20180502182026-17-13366/sejuta-rumah-program-vital-yang-dinomorduakan,* diakses pada tanggal 5 April 2019.

Ini Para Pengembang yang Dilaporkan Djan Faridz ke Polisi", *https://finance.detik.com/properti/d-2618153/ini-para-pengembang-yang-dilaporkan-djan-faridz-ke-polisi.*

Japardi, Larrisa. (2018), "Penerapan Konsep Hunian Berimbang Dalam Pembangunan Rumah Susun Komersial (Studi Pada Royal Condominium Medan)". *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat "129 Rumah di Kota Yogyakarta Terima Bantuan Bedah Rumah", dalam *https://www.pu.go.id/berita/view/15227/129-rumah-di-kota-yogyakarta-terima-bantuan-bedah-rumah.*

Kristian, 2014, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi, *Artikel*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 44 No. 1.

Lumingkewas, Cindy Sandra. 2016, *Analisis Yuridis Pemaknaan Konsep dalam Pasal 16 Undang-Undang Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,* Artikel, Arena Hukum Volume 9, Nomor 3.

Muladi, 2003, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime,* Artikle, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mumpuni, Dyah Maryulina Budi. 2015, Pelaksanaan Pemberian Kepastian Hukum bagi Pembeli Perseorangan atau Badan Hukum sebagai Pemegang Hak atas Kondominium Hotel (Kondotel) di Kabupaten Slemana, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun.

Perumahan Umum Nasional "Program Sejuta Rumah Merupakan Bagian dari Nawacita" *http://www.perumnas.co.id/program-sejuta-rumah-merupakan-bagian-dari-nawacita/,* Diakses pada tanggal 4 April 2019.

Purnama, Feri. 2011, "20% Rumah Rusun wajib dialokasikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah", *https://bisnis.tempo.co/read/362102/20-persen-rusun-wajib-dialokasikan-untuk-masyarakat-berpenghasilan-rendah/full&view=ok*

Purwanti, Endang Sri. (2012), "Evaluasi Kebijakan Publik Tentang Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus: Kota Depok)." *Tesis* Magister Arsitektur Universitas Indonesia.

Pusat Pengelolaan Dana dan Pembiayaan Perumahan "Data Backlog Kepemilikan Rumah", dalam *http://ppdpp.id/data-backlog/,* diakses pada 2 Desember 2018.

Prof. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. Putusan 23/PUU-XVI/2018, Keterangan Ahli dalam sidang perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Real Estate Indonesia Dewan Pengurus Daerah Yogyakarta "REI DIY pasok 200 unit rumah subsidi di DIY", dalam *http://jogja.tribunnews.com/2018/02/01/rei-diy-pasok-200-unit-rumah-subsidi-di-yogya-tahun-2018.*

Sekertaris Kabupaten "Canangkan Program Pembangunan Sejuta Rumah Presiden Jokowi ajak BUMN Berpartisipasi", *https://setkab.go.id/canangkan-program-pembangunan-sejuta-rumah-presiden-jokowi-ajak-bumn-berpartisipasi/,* diakses pada 25 Maret 2019.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Subkhan, Mokh. (2008), "Pengelolaan Rumah Susun Sederhana di Cengkareng Jakarta Barat" *Tesis,* Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.

Tim DUAZ Property/Estungkara, **"**Kewajiban Pelaku Pembangunan Rumah Susun Komersial Menyediakan Rumah Susun Umum Sekurang-Kurangnya 20 % (Duapuluh Persen) Dari Total Luas Lantai Rumah Susun Komersial Yang Dibangun" *Legal Opinion* untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Wingjosoebroto, Soetandyo. 1993, "*Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia,* Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.

……. 1995, Sebuah Pengantar ke arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II, *Makalah,* disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional dalam PJP II, (BPHN dan Departemen Kehakiman), Jakarta.

Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INDEKS ISTILAH

A

Ad Hoc 30, 64.

Aksesibilitas 3, 14, 15, 44.

Asas *Legalitas* 28, 31, 32.

B

Backlog 1, 4, 86, 88, 89, 98, 99. 100.

Badan Hukum 6, 28, 74, 75, 78, 81, 108, 109, 111, 112, 121, 122, 136.

Badan Pusat Statistik 1, 87, 88.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 3, 4.

C

Cost and Benefit principle 30, 34, 64, 65, 69, 70, 71, 88, 139.

D

Dekriminalisasi 33, 65, 67, 68.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) 17, 54, 55, 86.

E

Enforceable 30, 64, 71, 96, 102, 139.

H

Hukum 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

31, 32, 33, 34, 35, 36, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104, 110, 114, 125, 128, 130, 131, 132, 135, 136, 139, 140.

Hunian Berimbang 6, 18, 19, 20, 52, 70, 71, 76, 80, 87, 88, 93, 95, 97, 98, 101,117 118, 122, 135, 137, 138, 139, 140.

I

In Abstracto 25.

In Concreto 26.

Ius Constituendum 23.

Ius Constitutum 23.

K

Kawasan Permukiman 2, 3, 6, 18, 20, 39, 40, 50, 51, 54, 55, 65, 66, 81, 82, 83, 92, 102, 120.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4, 5, 78, 80, 81, 85,

Kepolisian Republik Indonesia 26, 95.

Ketentuan Pidana 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 32, 47, 48, 49, 56, 62, 71, 72, 75, 76, 78, 81, 90, 95, 96, 97, 104, 113, 115, 117, 119, 140, 141.

Koordinasi 14, 72, 81, 97, 98,

Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

123.

Kriminalisasi 9, 10, 11, 12, 16, 21, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 47, 48,56, 63, 64, 65, 66, 67,68, 70, 71, 72, 75, 76, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 103, 119, 140.

L

Lex certa 31, 76, 80.

M

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 56, 67, 70, 76, 77, 78, 82, 83, 88, 89, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 135, 139, 140.

Menteri 20, 51, 77, 78, 80, 81, 82, 88, 89, 111, 112, 113, 115, 116, 122, 137, 138.

O

Overbelasting 34, 66, 70, 95.

Overkriminalisasi 30, 65, 71, 76, 81, 140.

P

Pelaku Pembangunan 6, 7, 8, 9, 12, 13, 21, 28, 35, 40, 43, 55, 70, 72, 73, 74, 75,

Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

	76, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 141, 142.
Pembentuk Undang-undang	10, 12, 31, 86, 96.
Penuntutan	32, 36, 98.
Penegak Hukum	26, 30, 34, 35, 64, 65, 69, 70, 84, 85, 86, 98, 140.
Pemeliharaan	15, 68.
Pemerintah Pusat (Pemerintah)	1, 4, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 20, 29, 33, 36, 40, 41, 43, 51, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 82, 83, 85, 89, 97, 98, 100, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 142.
Pemerintah Daerah (Pemda)	2, 3, 4, 5, 17, 43, 54, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 81, 83, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 123, 131.
Pemilik	3, 4, 36, 37, 42,76, 97, 98, 99, 100, 101, 102.
Pengadilan	15, 26, 97.

Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Penghuni 1, 14, 15, 16, 36, 39, 44, 98, 99, 103.

Pengelolaan 13, 14, 15, 16, 44, 68, 98, 99, 106, 108, 109.

Perawatan 15.

Perhimpunan Pemilik &Penghuni Sarusun (PPPSRS) 55, 102.

Perumahan 2, 3, 4, 5, 6, 15,16, 17, 18, 19, 38, 39, 50, 51, 52, 54, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 94, 109, 111, 120, 143.

Politik Hukum 22, 23, 24, 25, 89, 90, 92, 136.

Politik Hukum Pidana 22, 23, 24.

Prasarana 3, 5, 14, 15, 44, 98, 100.

Putusan 26, 33, 63, 68, 114.

R

Real Estate Indonesia (REI) 4, 5, 54, 55, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 94.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 17, 68.

Rumah 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 16, 36, 37, 43, 67, 68, 69, 70, 71, 77, 79, 82, 83, 88, 89,

Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

	90, 92, 116, 118.
Rumah Susun	3, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 19, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142.
Rumah Susun Komersial	6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 38, 40, 47, 48, 56, 70, 72, 76, 77, 78, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 111, 112, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142.
Rumah Susun Milik (Rusunami)	18, 101.
Rumah Susun Umum	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 37, 40, 41, 47, 48, 49,

Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

56, 70, 76, 78, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 111, 112, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 137, 138, 139, 140, 141, 142.

Rumah Susun Sewa (Rusunawa) 14, 15, 18.

S

Sarana 3, 5, 14, 15, 24, 31, 33, 38, 44, 45, 79, 98, 100.

Swadaya 3, 4, 5, 42, 67, 80.

T

Tahap Aplikasi 26.

Tahap Eksekusi 26.

Tahap Formulasi 25.

Tindak Pidana 10, 28, 29, 31, 35, 62, 63, 64, 75, 82, 83, 106, 107, 118, 119, 110, 112, 113, 115, 116, 141.

U

Ultimum Remedium 30, 36, 65.

Unit 2, 4, 5, 15, 16, 51, 66, 67, 68, 69, 71, 76, 86, 88, 89, 100,101,122,125, 128, 137.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi**
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Urgensi 19.

Utilitas Umum 5, 98, 100.

V

Valid 17, 53.

Vertical Housing 36, 37, 67.

Victimizing 30, 64.

Visualisasi 15.

W

Welfare 24, 82.

Wetenschap 22.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INDEKS SUBYEK

A

Adrian Sutedi 38.

Ali Tranghanda 80, 81.

Ahmad Muliadi 89.

Andi Hamzah 96.

B

Bambang Sunggono 49, 59.

Barda Nawawi Arief 23, 24, 25, 33, 35, 94, 95.

Basuki Hadimoeljono 100.

Bramantyo 67.

C

Cindy Sandra Lumingkewas 87.

D

Dyah Maryulina Budi Mumpuni 6.

E

Endang Sri Purwanti 16, 18.

F

F. Sugeng Istanto 57.

G

Gregorius Widiartana 55, 87, 93, 94, 95, 96.

H

H. Zainuddin Ali 45.

Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

J

J. E. Sahetapy 31.

Jhony Sofyan Fajar Subrata 5.

Joko Widodo 100.

M

Mahfud M.D. 22, 25.

Marcus Priyo Gunarto. 75, 76.

Maria SW Sumardjono 52.

Moeljatno 27, 28, 36.

Muhammad Zaki Mubarrak 101, 105.

Mukti Fajar 54, 58.

Muladi 23, 24, 25, 30, 63, 82.

M. Hamdan 22.

P

P. A. F. Lamintang 27, 96.

Pater Mahmud Marzuki 48, 50.

R

Rama Adyaksa Pradipta 4, 5, 55, 70, 71, 75.

S

Soerjono Soekanto 28, 29, 45, 46, 47, 53, 57, 59.

Soetandyo Wignyosoebroto 45.

Sri Mamudji 59.

Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sudarto 10, 29, 30, 34.

Suwondo 10.

T

Teguh Prasetyo 10, 26, 29, 35.

U

Urip Santoso 85, 112.

Y

Yuliato Achmad 54, 55, 58.

Yunita Rama Hapsari 55, 67, 118.

Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GLOSARIUM

Ad hoc	Sesuatu yang sifatnya sementara atau tidak permanen.
Aksesibilitas	Kemudahan akses untuk di capai oleh orang, di implementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya, dan di utamakan untuk kaum disabilitas / difable.
Asas *Legalitas*	Tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.
Backlog	Kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.
Badan Hukum	Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang atau badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Badan Pusat Statistik	Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Bantuan Pemerintah dari Kementrian PUPR berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk

Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

	meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
Cost and Benefit Principle	Prinsip biaya dan hasil artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
Dekriminalisasi	Tadinya suatu perbuatan pidana diatur di undang-undang, kemudian undang-undangnya diubah dan perbuatan itu tidak lagi menjadi ketentuan pidana.
Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	Lembaga pemerintah dibawah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Enforceable	Hukum atau aturan yang dapat dilaksanakan atau di tegakan.
Hunian Berimbang	Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial.
Ius Constituendum	Hukum yang akan berlaku di masa depan.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Ius Constitutum	Hukum yang berlaku pada saat ini atau hukum positif.
Kawasan Permukiman	Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Kejaksaan Republik Indonesia	Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Kementrian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Kepolisian Republik Indonesia	Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.
Koordinasi	Menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama.

Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kriminalisasi	Suatu proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
Lex Certa	Rumusan dalam ketentuan pidana harus jelas dan tidak bisa di interpretasikan lain selain yang dimaksud dalam undang-undang.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh satuan rumah susun umum.
Menteri	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Overbelasting	Kelampauan beban tugas dalam hal ini beban tugas badan-badan penegak hukum melebihi beban kapasitas tugas untuk penegakan hukum.
Overkriminalisasi	Kriminalisasi yang terlalu banyak.
Pelaku Pembangunan	Orang dan/atau perusahaan yang melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Penegak Hukum	Aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma. hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan

Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

	memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
Penuntutan	Suatu tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang, yang tata caranya telah diatur di dalam Undang-undang berdasarkan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.
Pemelihaaan	Kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
Pemerintah Pusat (Pemerintah)	Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah	Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemilik	Setiap orang yang memiliki satuan rumah susun.
Pengadilan	Badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
Penghuni	Orang yang menempati sarusun, baik sebagai pemilik maupun bukan pemilik.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pengelolaan	Suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah susun.
Perawatan	Kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
Perhimpunan Pemilik & Penghuni Sarusun	Badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni sarusun.
Perumahan	Kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
Politik Hukum	Suatu proses pencapaian suatu tujuan kehidupan masyarakat melalui suatu Undang-undang.
Politik Hukum Pidana	Bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikatif (kebijakan yudikatif), dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif).
Prasana	Kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
Putusan	Pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi

Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

	wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.
Real Estate Indonesia (REI)	Persatuan perusahaan real estate Indonesia atau Perhimpunan Pelaku Pembangunan Rumah Susun.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
Rumah	Bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
Rumah Susun	Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
Rumah Susun Komersial	Rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
Rumah Susun Umum	Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi

Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

	masyarakat berpenghasilan rendah.
Sarana	Fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
Satuan Rumah Susun (Sarusun)	Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
Slums	Perumahan kumuh atau perumahan tidak layak huni.
Subsosialitet	Mengakibatkan bahaya bagi masyarakat.
Tahap Aplikasi	Tahap penegakan atau penerapan hukum pidana (*in concreto*) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai dengan ke pengadilan.
Tahap Eksekusi	Tahap penegakan pelaksanaan hukum secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan.
Tahap Formulasi	Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa

Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

	kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
Ultimum Remedium	Sanksi pidana adalah alat/upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.
Unit	Petak/bagian terkecil dari sesuatu yang dapat berdiri sendiri.
Urgensi	Hal yang sangat penting/keharusan yang mendesak.
Utilitas Umum	Kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
Valid	Suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.
Victimizing	Unsur korban baik actual maupun potensial.
Visualisasi	Pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar, tulisan (kata dan angka), peta, grafik, dsb.